



## BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

#### A. Realisasi Pendapatan

Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.401.025.000 dapat direalisasi sebesar Rp.1.089.701.900 atau 77,8 % yang berarti kurang dari anggaran sebesar Rp. 311.323.100

Rincian realisasi pendapatan daerah sebagai berikut .:

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	
			Rp.	%
<b>PENDAPATAN</b>	1.401.025.000	1.089.701.900	( 311.323.100 )	( 22,2 )
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.401.025.000	1.089.701.900	( 311.323.100 )	( 22,2 )
1.Retibusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	550.000.000	449.996.000	( 100.004.000 )	( 18,2 )
2.Retibusi Pengujian Kendaraan Bermotor	676.725.000	484.841.600	( 191.883.400 )	( 28,6 )
3.Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum.	110.000.000	107.403.700	( 2.596.300 )	( 2,3 )
4.Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal.	1.800.000	2.400.000	600.000	33,3
5.Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	42.500.000	25.613.500	( 16.886.500 )	( 39,7 )
6.Hasil Sewa BMD	20.000.000	6.012.000	( 13.988.000 )	( 69,9 )
7.Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0	13.435.100	13.435.100	100
<b>Jumlah PAD</b>	1.401.025.000	1.089.701.900	( 311.323.100 )	( 22,2 )
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1.401.025.000	1.089.701.900	( 311.323.100 )	( 22,2 )



## B. Realisasi Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 34.924.820.414 dapat direalisasi Rp. 33.593.787.698 atau 96,2 % terdiri dari Belanja Operasional direncanakan sebesar Rp. 12.311.232.027 dapat direalisasi sebesar Rp. 11.344.158.729 atau 92,1 %. Dan Belanja Modal di rencanakan Rp. 22.613.588.387 dapat direalisasikan sebesar Rp. 22.249.628.969 atau 98,4 %

Menurut Kelompok Belanja	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH/ BERKURANG	%
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>12.311.232.027</b>	<b>11.344.158.729</b>	<b>( 967.073.298 )</b>	<b>(7,8)</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.301.800.654</b>	<b>4.173.224.269</b>	<b>( 128.576.385 )</b>	<b>(2,9)</b>
Belanja Gaji & Tunjangan ASN	2.608.697.806	2.548.239.117	( 60.458.689 )	(2,3)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.693.102.848	1.624.985.152	( 68.117.696 )	(4,0)
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.259.431.373</b>	<b>5.420.934.460</b>	<b>( 838.496.913 )</b>	<b>(13,3)</b>
Belanja Barang	1.171.225.172	1.061.676.213	( 109.548.959 )	(9,3)
Belanja Jasa	3.333.423.473	3.103.418.935	( 230.004.538 )	(6,8)
Belanja Pemeliharaan	424.390.543	308.911.118	( 115.479.425 )	(27,2)
Belanja Perjalanan Dinas	400.628.615	289.695.976	( 110.931.639 )	(27,7)
Belanja uang/atau jasa untuk diberikan kepada pihak III/pihak lain/masyarakat	929.763.570	657.232.218	( 272.531.352 )	(29,3)
<b>Belanja Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belanja Hibah kepada Badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yg berbadan hukum Indonesia	0	0	0	0
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Belanja Bantuan Sosial kepada individu	1.240.000.000	1.240.000.000	0	100
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	510.000.000	510.000.000	0	100
<b>Belanja Modal</b>	<b>22.613.588.387</b>	<b>22.249.628.969</b>	<b>( 363.959.418 )</b>	<b>(1,6)</b>
Belanja Modal Tanah	1.585.116.887	1.581.145.000	( 3.971.887 )	(0,6)
Belanja Peralatan dan Mesin	4.176.271.500	3.964.172.590	( 212.098.910 )	(5,0)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	248.000.000	244.923.000	( 3.077.000 )	(1,2)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.388.100.000	16.247.165.379	( 140.934.621 )	(0,9)



Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	216.100.000	212.223.000	( 3.877.000 )	(1,8)
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>33.523.795.414</b>	<b>32.504.085.798</b>	<b>(1.019.709.616)</b>	<b>(3,0)</b>
<b>SISA LEBIH /KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>33.523.795.414</b>	<b>32.504.085.798</b>	<b>(1.019.709.616)</b>	<b>(3,0)</b>

**2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

**1. Hambatan Pencapaian Target Pendapatan Daerah**

Karena masih ada dampak pandemi Covid 19, mengakibatkan terjadinya penurunan sektor perekonomian sehingga banyak wajib retribusi yang tidak bisa melunasi kewajibannya.

**2. Hambatan Pencapaian Target Belanja.**

Masih adanya PPKM sebagai dampak Covid 19, sehingga ada beberapa belanja yang tidak terserap maksimal : alat/ bahan untuk kegiatan, makanan minuman rapat, tidak ada kasus pertanahan yang di fasilitasi sampai provinsi,